



# Konflik Sosial Di Kota Ternate Tahun 1999-2000

M. Ifzal Limatahu<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

\* E-mail: [ifzal.always99@gmail.com](mailto:ifzal.always99@gmail.com)

**Citation:** Limatahu, M.I. "Konflik Sosial Di Kota Ternate Tahun 1999-2000". *Socio Historica* 2023, Vol. 2, No. 2. DOI:

<https://doi.org/10.15408/sc.v2i1.38918>

**Publisher's Note:** Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Ternate is a transit city located in the North Maluku region. As one of the transit cities, Ternate possesses a diversity of ethnicities, tribes, religions, and races that lived in harmony and coexistence, upholding the cultural values of adat se atorang. However, this coexistence suddenly disappeared when a social conflict erupted in 1999, involving both religious groups (Islam and Christianity) and community factions, namely the White Army and the Yellow Army. This study aims to explain the social conflict that occurred in Ternate City during 1999–2000. The author uses the historical method with a sociological approach, complemented by the Conflict theory proposed by Ralf Dahrendorf (1959). The discussion of this research focuses on the order of social life at the time of the social conflict in Ternate City in 1999–2000 and the subsequent impacts. Based on the data found, it is concluded that the escalating conflict was caused by several factors: the political upheaval of local elites who were hungry for power, leading to polarization within society, thus making inter-community conflict inevitable. Furthermore, the existence of Government Regulation (PP) No. 42/1999 concerning the expansion of Malifut Sub-district in the Kao area was also a significant factor in the Ternate conflict, especially with the evacuation of Makian residents to Ternate City. The influx of refugees from Ambon also contributed to the outbreak of this social conflict. Throughout the conflict, the customary and cultural ties of adat se atorang embedded in the community played a role in mitigating the escalation of conflict and facilitated reconciliation and peace in the post-conflict period.

**Keywords:** Ternate City, Social Conflict, Islam, Christianity, White Troops, Yellow Troops.

**Abstrak:** Kota Ternate merupakan sebuah kota transit yang ada di kawasan Maluku Utara. Sebagai salah satu kota transit, Ternate mempunyai keberagaman etnis, suku, agama, dan ras yang hidup rukun dan saling berdampingan antara satu sama lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan adat se atorang. Namun hidup berdampingan tersebut seketika lenyap ketika terjadi konflik sosial tahun 1999 baik antar agama yakni Islam dan Kristen maupun antar kelompok masyarakat yakni Pasukan Putih dan Pasukan Kuning. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik sosial yang terjadi di Kota Ternate tahun 1999-2000 tersebut. Penulis menggunakan metode historis dengan pendekatan sosiologi, ditambah dengan teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf (1959). Pembahasan penelitian ini berfokus pada tatanan kehidupan sosial pada saat terjadinya konflik sosial di Kota Ternate tahun 1999-2000 dan dampak setelahnya. Berdasarkan data yang ditemukan, diperoleh kesimpulan bahwa konflik yang berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pergolakan politik elite lokal yang haus akan kekuasaan yang menimbulkan polarisasi dalam lapisan masyarakat sehingga konflik antar masyarakat sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Selain itu dengan adanya PP. No. 42/1999 tentang pemekaran Kecamatan Malifut di daerah Kao juga menjadi faktor penting terjadinya konflik di Kota Ternate, dengan mengungsinya warga Makian ke Kota Ternate. Kemudian terjadinya gelombang pengungsi dari Ambon juga turut andil dalam meletusnya konflik sosial ini. Selama terjadinya konflik, ikatan adat dan budaya adat *se atorang* yang tertanam di masyarakat memiliki peran dalam menekan eskalasi konflik serta berperan memfasilitasi rekonsiliasi dan perdamaian pasca-konflik.

**Keywords:** Kota Ternate, Konflik Sosial, Islam, Kristen, Pasukan Putih, Pasukan Kuning.

---

## 1. Pendahuluan

Semangat reformasi yang bermula pada tahun 1998 memberikan peluang kepada masyarakat dan juga daerah di Indonesia agar dapat membuat dan menyokong kehidupan mereka ke arah yang lebih baik, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Untuk warga Maluku Utara sendiri yang berdomisili jauh dari Kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku, informasi mengenai reformasi adalah suatu peluang yang ditunggu-tunggu untuk meningkatkan kehidupan mereka yang sebelumnya mengalami ketertinggalan, baik dari segi sarana ataupun prasarana ke arah yang lebih maju.<sup>1</sup> Peluang tersebut bermaksud supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal untuk mengurus dan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan program-program yang langsung merujuk kepada kebutuhan masyarakat. Selain itu, peluang ini juga dijalankan agar masyarakat dan pemerintah dapat merajut perdamaian dan juga saling menghormati perbedaan yang merupakan tuntutan reformasi dalam menyokong perkembangan suatu daerah.

Ironisnya, reformasi membuka peluang bagi sebagian elite lokal yang mempunyai modal finansial dan simbolik dengan mengambil alih kesempatan itu untuk menyangga kekuasaan dan penguasaan atas segala sumber daya alam yang ada. Dengan penyelarasan oleh kelompok elite ini, konflik sosial secara perlahan muncul di masyarakat, karena peluang ini ditempatkan pada kepentingan dan keegoisan elite politik untuk mengambil alih dan menjaga kekuasaan mereka masing-masing agar tidak ada yang merebutnya, dan bukan untuk meningkatkan potensi masyarakat yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan reformasi itu sendiri.

Konflik dan kerusuhan sudah sering terjadi di Indonesia sejak masa kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Konflik dan kerusuhan juga pernah terjadi dari Sabang sampai Merauke dan tidak terkecuali di Kota Ternate, Maluku Utara. Kerusuhan tersebut tentunya berakar pada budaya berpolitik kerajaan-kerajaan dan juga pada masyarakat. Permasalahannya adalah kerusuhan digunakan dengan tujuan apa?. Konflik di Kota Ternate ini, merupakan suatu bagian dari persaingan antar elite politik lokal untuk perebutan kekuasaan.

Maluku dulunya dikenal sebagai daerah kerajaan dan penghasil rempah-rempah terbaik di dunia seperti cengkeh dan pala. Oleh sebab itu, daerah Maluku kemudian banyak berdatangan pedagang. Para pedagang ini berasal dari China, Arab, Eropa dan juga pedagang lokal yang datang dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah tersebut. Kehadiran para pedagang tersebut mulai mempengaruhi secara ekonomi, sosial, dan budaya kehidupan masyarakat adat seperti Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Makian, dan Moti. Kondisi geografis tersebut menimbulkan banyak konflik, baik dari internal maupun eksternal.

Di era Orde Baru, salah satu daerah yang jarang mendapat perhatian sampai menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi adalah daerah Maluku. Setelah memasuki masa reformasi, Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, barulah Maluku dan Maluku Utara kemudian menjadi sorotan pemerintah Indonesia, termasuk isu-isu terkait kepentingan elite lokal, konflik antar etnis,

---

<sup>1</sup> Abdullah Totona, *Ambiguitas Kaum Intelektual: Representasi Identitas pada Konflik Maluku Utara 1999-2000*. Yogyakarta: Galang Press, 2017. hal. 69

dan konflik agama. Konflik yang bermula pada tahun 1999 itu mengagetkan berbagai pihak baik yang ada di daerah secara khusus maupun di Indonesia secara umum. Konflik ini pada awalnya terjadi antar etnis kemudian secara cepat berkembang menjadi konflik antar agama, dalam hal ini agama Islam dan Kristen. Daerah ini awalnya merupakan daerah aman yang diikat oleh konvensi budaya seperti *Pela Gandong* di Ambon dan *Adat Se Atorang* di Maluku Utara— *Moloku Kie Raha* adalah sebutan bagi empat tanah adat yang ada di Maluku Utara antara lain Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.

Hubungan harmonis yang diwariskan secara turun temurun antara kerajaan yang ada di Maluku Utara sebetulnya berperan dalam menjaga kedamaian yang sudah ada, baik antar umat kristiani maupun antar umat muslim sendiri. Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang pemekaran wilayah Kecamatan Malifut di Kecamatan Kao membuat adanya gesekan akibat dari tidak diterimanya kebijakan tersebut oleh masyarakat Kao itu sendiri.<sup>2</sup> Penduduk Kecamatan Malifut mayoritas muslim dan masyarakat Kao beragam, ada Islam, Kristen, dan kepercayaan lokal lainnya. Konflik yang muncul karena ketidakpuasan atas pemekaran kecamatan Malifut ini mengakibatkan pelemparan sampai kepada pembakaran rumah dan tempat-tempat ibadah. Pada mulanya bentuk konflik itu sederhana, namun kemudian berubah menjadi sebuah kerusuhan sporadis yang melibatkan kedua kelompok etnis tersebut. Bahkan berujung menjadi perselisihan antar agama Islam dan Kristen.

Konflik sosial di Maluku Utara pada tahun 1999-2000 itu adalah salah satu peristiwa yang menghancurkan konsep pluralisme atau nilai hidup bersama. Di masa itu masyarakat yang berbeda agama dibuat saling mencurigai, membenci, hingga saling membunuh antara satu dengan yang lain. Konflik ditandai dengan beberapa alasan yang menyulut perselisihan dalam masyarakat, dimulai dari kepentingan ekonomi, politik, perebutan kekuasaan antar elite, keirihan antar sesama, atau penguasaan atas sumber daya alam, khususnya produksi pertambangan dan perkebunan. Namun, dari beberapa alasan tersebut, agama merupakan alasan yang paling utama dan kuat untuk mengarahkan pemahaman masyarakat baik yang beragama Islam maupun Kristen untuk saling berkonflik.

Apabila ditinjau lagi ke belakang, kerusuhan yang terjadi di suatu tempat bukanlah suatu peristiwa yang hanya terjadi begitu saja, melainkan memiliki alasan yang didukung dengan bukti-bukti nyata yang ada di masyarakat pasti akan menjawab semua itu. Dimulai dari konflik sederhana maupun konflik yang rumit, seperti konflik sosial di Maluku Utara. Konflik sosial keagamaan yang terjadi di Maluku Utara merupakan konflik yang mengandung beberapa alasan yang rumit tetapi saling berhubungan, dimulai dari warisan budaya, pertikaian antar etnis, perebutan kekuasaan antar elite politik lokal itu sendiri, perebutan sumber daya alam, dan yang paling parah adalah yang mengatasnamakan agama sebagai alasan untuk berperang.

Kekerasan sosial di Maluku Utara secara umum dibagi menjadi empat gelombang konflik dengan motif latar belakang yang berbeda-beda.<sup>3</sup> Pada gelombang pertama, konflik terjadi pada bulan Agustus tahun 1999 yang bermula dari perselisihan antara Suku Kao sebagai suku asli daerah Kecamatan Kao dengan Suku Makian yang merupakan imigran dari Pulau Makian yang berada di selatan pulau Halmahera. Gelombang kekerasan kedua

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.

<sup>3</sup> Sri Yanuarti, Yusuf, et al., *Konflik Maluku Utara (Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI Press, 2004.

timbul pada bulan Oktober-November 1999. pada gelombang kedua ini terdapat sekitar 16 desa pendatang dari Suku Makian diserang dan dihancurkan, sementara untuk korban jiwa yang meninggal mencapai sekitar 100 orang dan kebanyakan dari orang-orang Muslim. Gelombang ketiga konflik sosial di Maluku Utara terjadi pada 26 Desember tahun 1999 sampai bulan Maret tahun 2000 yang merupakan akibat dari konflik yang sudah terjadi di Maluku Tengah. Pada masa itu banyak pengungsi yang datang dari Ambon yang merupakan dampak konflik di Ambon. Kemudian gelombang keempat terjadi pada tanggal 19 Juni tahun 2000 yang bertempat di desa Duma Kecamatan Galela. Pada gelombang ini terdapat orang-orang yang mengatasnamakan orang-orang Islam yang menyerang masyarakat desa Duma, yang mana mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dalam konflik yang tidak sebanding itu, kurang lebih 215 orang meninggal dan 500 orang lainnya hilang berbarengan dengan tenggelamnya kapal Nusa Bahari yang saat itu membawa para pengungsi dari desa Duma untuk mengungsi ke daerah aman.<sup>4</sup> Gelombang kerusuhan tersebut, kebanyakan menunjukkan konflik agama yang tidak sedikit memakan korban diantara kedua belah pihak.

Adapun konflik di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, tidak sama dengan konflik di Indonesia pada umumnya jika dilihat lebih dalam. Selain konflik antar agama yakni Islam dan Kristen, konflik tahun 1999 di Ternate juga terjadi antara pasukan putih dan pasukan kuning.<sup>5</sup> Kedua pasukan ini sama-sama beragama Islam. Namun yang menjadi pembeda adalah pasukan putih meliputi orang-orang muslim yang tergabung dalam laskar jihad yang merupakan warga masyarakat biasa, sedangkan pasukan kuning adalah orang-orang muslim yang merupakan pasukan adat dari Kesultanan Ternate yang mengenakan baju kuning, mereka ini disebut sebagai *balakusu se kano-kano*, yaitu orang-orang yang setia kepada Sultan Ternate.

Bagaimanapun konflik itu sudah tidak dapat terelakkan lagi. Dimana peristiwa yang terjadi di Kota Ternate itu sangat mempengaruhi sikap keberagamaan masyarakat setempat.

Setelah berakhirnya konflik antara Islam dan Kristen maupun antara Islam dengan Islam (ikat kepala putih dan ikat kepala kuning) di Kota Ternate, banyak dampak yang harus dikaji lebih dalam terutama dampak sosial kemasyarakatan, kebijakan pemerintah sebagai solusi atas konflik tersebut, dan sikap masyarakat dalam bersosial dan beragama. Setiap konflik yang terjadi pasti juga memiliki dampak dan pastinya dampak negatif atau dampak yang merugikan lebih banyak daripada dampak positifnya, sebab tidak hanya kehilangan tempat tinggal namun nyawa juga yang menjadi taruhannya.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, saya lebih menitikberatkan kepada konflik yang ada di Ternate dengan alasan bahwa konflik yang terjadi di Ternate sedikit berbeda dengan yang sudah terjadi di Ambon dan Poso yang merupakan konflik antara Islam dan Kristen. Di Kota Ternate sendiri selain konflik yang melibatkan antara agama Islam dan Kristen, ada juga konflik yang terjadi antar sesama muslim itu sendiri yang terjadi antara kelompok kesultanan dengan kelompok laskar jihad.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka fokus permasalahan utama dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Konflik Sosial Di Kota Ternate Tahun 1999-2000?".

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat konflik ini melalui perspektif teori konflik. Dengan menggunakan perpektif teori konflik ini adalah untuk memahami latar belakang,

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 3.

<sup>5</sup> M. Junaidi, Sejarah Konflik Dan Perdamaian Di Maluku Utara (Refleksi Terhadap Sejarah Moloku Kie Raha).

sebab akibat, dan dampak sosial dari konflik yang terjadi di Kota Ternate. Perspektif teori konflik ini dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf yang tercantum dalam bukunya George Ritzer dengan judul *Teori Sosial*.<sup>6</sup>

Dahrendorf merupakan tokoh utama yang berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus), maka dari itu teori sosiologi perlu dibagi menjadi dua bagian; teori konflik dan teori konsensus.<sup>7</sup> Para ahli teori konsensus harus mempertimbangkan nilai integrasi dalam masyarakat dan para ahli teori konflik harus mempertimbangkan konflik kepentingan dan penggunaan kekuatan untuk mempersatukan masyarakat dalam menghadapi tekanan. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak bisa ada tanpa adanya konsensus dan konflik di kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak akan timbul konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.

Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas. Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran di dalam masyarakat. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan dapat mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri.

Menurut Dahrendorf, otoritas tidak konstan karena ia terletak dalam posisi, bukan di dalam diri orangnya. Karena itu seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tidak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Ini berasal dari argument Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif, yaitu perkumpulan orang yang diatur oleh orang yang memiliki hak untuk memerintah.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kondisi sebelum, saat, dan pasca konflik sosial yang terjadi di Kota Ternate tahun 1999-2000. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pembaca baik mahasiswa/i atau sejarawan maupun pembaca umum tentang kehidupan masyarakat Kota Ternate sehari-hari, di saat, dan pasca terjadinya konflik serta dampaknya. Penelitian ini juga dapat menjadi pelajaran serta wawasan tambahan mengenai konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan dan bisa dikembangkan atau dikaji ulang oleh peneliti berikutnya dengan penemuan-penemuan baru.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode historis. Dalam metode historis ada beberapa tahapan untuk membantu pemaparan penelitian, yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Pada tahap pertama yaitu heuristik atau pengumpulan data, peneliti harus mengumpulkan data sebanyak mungkin baik itu sumber primer maupun sekunder yang bersangkutan dengan objek penelitian peneliti.

Tahapan pertama adalah heuristik, menurut Kuntowijoyo heuristik merupakan sebuah kegiatan dalam merumuskan atau mengumpulkan sumber, data dan informasi sesuai dengan masalah yang akan dibahas baik secara tertulis maupun tidak tertulis (dokumen

<sup>6</sup> George Ritzer, *Sociological Theory*. (New York: McGraw-Hill, 2011). Hal. 265.

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 266.

dan artefak) yang disesuaikan dengan jenis sejarah yang akan ditulis.<sup>8</sup> Sumber primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dari buku dan koran-koran sezaman yang membahas mengenai penelitian yang penulis teliti. Sumber primer yang penulis dapatkan adalah dari Peraturan Pemerintah No.42/1999 Tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan Baru Makian Malifut dan Laporan Sejarah Lisan. Sumber buku yang penulis gunakan adalah buku karya Jan Nanere dkk. yang berjudul *Halmahera Berdarah (Kerusuhan Maluku)* yang diterbitkan pada tahun 2000.<sup>9</sup> Selain itu juga ada beberapa sumber dari koran sezaman yang penulis dapatkan di Perpustakaan Nasional RI yaitu: koran *Kompas* dengan judul *Pengungsi Halmahera di Ternate* terbitan tanggal 11 Januari 2000,<sup>10</sup> *Peristiwa Menjelang Kerusuhan Maluku Utara* terbitan tanggal 15 Januari 2000,<sup>11</sup> *Kasus Maluku Utara Mainan Elite Politik Lokal* terbitan tanggal 10 Januari 2000,<sup>12</sup> *Jalur Makassar-Ternate Dibuka Asal Ada Jaminan Keamanan* terbitan tanggal 12 Januari 2000.<sup>13</sup> Koran-koran sezaman ini penulis kumpulkan untuk memeriksa kembali informasi yang akurat mengenai Koran tersebut.

Untuk sumber sekunder sendiri, penulis menemukan melalui buku-buku ataupun artikel jurnal yang sudah penulis kumpulkan dan yang menunjang pembahasan terkait seluk beluk serta penyebab-penyebab terjadinya konflik di Ternate pada tahun 1999-2000 yang penulis dapatkan melalui google cendikia. Salah satu data sumber adalah dari buku karya Sri Yanuarti dkk. yang berjudul *Konflik Maluku Utara: Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian jangkak Panjang*.<sup>14</sup> Peneliti mendapatkan buku ini dalam koleksi khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tahap Verifikasi dan Kritik Sumber dilakukan untuk menentukan kredibilitas data-data koran sezaman tersebut. Selanjutnya, Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta sejarah ini dengan konsep otoritas dan subordinasi dalam Teori Konflik Dahrendorf untuk menganalisis motivasi elite lokal. Atas dasar uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi yang berdasar pada buku karya Soerjono Soekanto yang berjudul *Sosiologi Sebuah Pengantar*.<sup>15</sup> Selain itu dijelaskan pula bagaimana dinamika kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat itu sendiri, dimulai dengan perubahan-perubahan setiap kelompok masyarakat dan juga konflik-konfliknya.

Kelompok sosial bukanlah kelompok yang statis, setiap kelompok perlu mengalami perubahan dan perkembangan.<sup>16</sup> Untuk memahami fenomena ini, perlu mempelajari dinamika kelompok-kelompok sosial itu. Pada umumnya kelompok sosial mengalami perubahan melalui pembentukan atau pembaharuan pola internal kelompok yang disebabkan oleh pengaruh eksternal. Kondisi ketidakstabilan dalam kelompok dikarenakan konflik antar anggota kelompok akibat ketidakseimbangan kekuasaan dalam kelompok. Ada kepentingan yang tidak seimbang menyebabkan ketidakadilan, ada kelompok yang menjadi korban dari kelompok yang mau mengambil alih kekuasaan, dan ada juga perbedaan pemahaman tentang cara untuk mencapai tujuan

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018. hal. 73.

<sup>9</sup> Jan Nanere et al., *Halmahera Berdarah*. Ambon: Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam, 2000.

<sup>10</sup> "Pengungsi Halmahera di Ternate." *Kompas*, 11 Januari 2000.

<sup>11</sup> Alhadar, "Peristiwa Menjelang Kerusuhan Maluku Utara." *Kompas*, 15 Januari 2000.

<sup>12</sup> "Kasus Maluku Utara Mainan Elite Politik Lokal." *Kompas*, 10 Januari 2000.

<sup>13</sup> "Jalur Makassar-Ternate Dibuka Asal Ada Jaminan Keamanan." *Kompas*, 12 Januari 2000.

<sup>14</sup> Sri Yanuarti, Yusuf, et al., *Konflik Maluku Utara (Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI Press, 2004.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 1989

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.145.

kelompok dan lain sebagainya. Semua ini membuat perselisihan di dalam kelompok yang menyebabkan perubahan dalam strukturnya.

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menjelaskan titik permasalahan konflik sosial di Kota Ternate yang mengarah kepada konflik antar sesama masyarakat. Selain itu, penggunaan pendekatan sosiologi ini diharapkan agar mampu melihat permasalahan mengenai konflik sosial di Kota Ternate dengan sudut pandang yang lebih luas, sehingga bisa menjelaskan kondisi geografis, sosial, politik, dan ekonomi yang ada pada masa itu.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Konflik selalu ada dan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama manusia masih hidup, tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini. Baik konflik intrapersonal, interpersonal, dan juga konflik antar kelompok bahkan antar pemeluk agama dan konflik antar negara. Berdasarkan hal itu, berikut beberapa faktor yang berimplikasi terjadinya konflik sosial di Ternate:

#### 3.1. Perebutan Kursi Gubernur

Terdapat Pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi dimana mahasiswa pada masa itu melakukan aksi massa besar-besaran dengan tujuan menurunkan Presiden Soeharto dari jabatan presidennya. Peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia, dan sampai sekarang semua sistem demokrasi dan tatanan berbangsa dan bernegara yang saat ini dijalankan merupakan buah dari reformasi. Hal ini juga merupakan awal mula dari terpecahnya konflik-konflik sosial di Indonesia baik di pusat pemerintahan di Jakarta maupun di daerah.

Melakukan reformasi menuju sistem politik yang lebih adil dan demokratis bukanlah tugas yang mudah dan dapat dilakukan dengan cepat. Proses tersebut sering diwarnai oleh beragam kepentingan dan manuver politik yang cenderung memicu dan memanfaatkan perbedaan, menjadikannya konflik yang dapat merambat dan mengancam kelancaran jalannya reformasi itu sendiri. Di dalam konteks negara kita, konflik semacam ini bahkan telah berubah menjadi bentuk kekerasan yang mengancam kedamaian internal dan kesatuan bangsa serta negara.

Dengan bertiupnya udara kebebasan akibat reformasi dan pemberian otonomi pada daerah, muncul kekuatan-kekuatan sosial politik baru di masyarakat yang mengambil posisi dalam perebutan kekuasaan. Dalam kaitan ini, orientasi kekuatan sosial politik tersebut adalah kekuasaan, yang terkadang mendapat semacam kemudahan dengan terjadinya konflik.

Pada saat terjadi reformasi, hal ini membuka peluang bagi masyarakat daerah Maluku Utara untuk segera melakukan pemekaran menjadi sebuah provinsi sendiri. Hal ini bertujuan agar masyarakat Maluku Utara dapat meningkatkan kehidupan sosial mereka ke arah yang lebih maju, baik sarana maupun prasarana. Sebelumnya, Maluku Utara masih menjadi kabupaten dibawah Provinsi Maluku, ini membuat akses untuk ke pusat kota yaitu ke Ambon terasa sangat jauh. Sehingga perlunya untuk dilakukan pemekaran agar daerah di Maluku Utara lebih mudah untuk dikembangkan. Ironisnya, peristiwa reformasi ini dimanfaatkan para elit lokal dan para provokator yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka sendiri sehingga banyak terjadi konflik yang kemudian terjadi dikarenakan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut.

Sebetulnya, hasrat masyarakat Maluku Utara untuk menjadi Provinsi yang mandiri, terpisah dari Maluku, memiliki akar sejarah yang cukup lama. Usaha ini pertama kali dimulai setelah bubarnya Negara Indonesia Timur (NIT) dalam kerangka Negara Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 17 Agustus 1950.<sup>17</sup> Inisiatif tersebut diprakarsai oleh Zainal Abidin Syah (Residen Maluku Utara) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Maluku Utara. Mereka membentuk sebuah badan yang disebut Badan Musyawarah Rakyat Daerah Perbatasan Maluku Utara untuk memperjuangkan status otonomi tingkat I bagi daerah Maluku Utara. Namun, aspirasi tersebut ditunda oleh Presiden Soekarno hingga penyelesaian masalah Irian Barat.

Pada masa pemerintahan Soeharto dalam era Orde Baru, perubahan tingkat I tidak lagi dianggap sebagai masalah yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh fokus kebijakan politik pada pembangunan ekonomi dibandingkan dengan aspek politik. Untuk mewujudkan tujuan ini, rezim Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan. Pertama, mereka melaksanakan stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan. Kedua, melakukan penataan politik dengan harapan terbentuknya sistem politik yang mendukung kebijakan ekonomi. Presiden Soeharto menggunakan istilah pembangunan untuk menggambarkan konsep ini. Dengan demikian, dalam merancang sistem politik pada awal pemerintahan Orde Baru, fokus utamanya adalah menyederhanakan struktur partai politik, termasuk dalam hal jumlah, pola dukungan, basis massa, aliran, dan ideologi yang dianut oleh partai. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan ini tampaknya kurang mendukung dan menutup peluang bagi Maluku Utara untuk mencapai status provinsi.

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, politik Indonesia mengalami perubahan signifikan. Dalam waktu yang relatif singkat, terjadi proses desentralisasi yang luas di Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan oleh beberapa tokoh dari Maluku Utara, seperti Sultan Ternate Mudaffar Syah, Asisten I Provinsi Maluku Thaib Armayin, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili, dan Walikota Ternate Syamsir Andili, yang bersatu untuk mengupayakan status Maluku Utara sebagai sebuah provinsi yang definitif.

Seperti di banyak wilayah lainnya, isu pemekaran wilayah di kepulauan Maluku menimbulkan berbagai perdebatan serius di kalangan pejabat pemerintah lokal dan antar warga masyarakat. Di lingkungan birokrasi, perdebatan tersebut terutama terfokus pada pembagian kekuasaan dan jabatan di wilayah yang baru dibentuk. Sementara itu, di tengah masyarakat, perdebatan lebih cenderung berkaitan dengan masalah eksistensi adat dan kontrol terhadap sumber daya di sekitar wilayah perbatasan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa kebijakan pemekaran wilayah merupakan salah satu penyebab pertikaian horizontal yang secara kasat mata terjadi dalam masyarakat Maluku Utara. Meskipun pertikaian antar elit juga tidak terelakkan, namun masih terlihat samar-samar terkait dengan kekuatan kelompok yang bertikai.

Pertikaian atau persaingan antar elite di Maluku Utara diawali dengan upaya membangkitkan kembali kekuatan kesultanan yang telah lama terkubur. Tiba-tiba saja kekuatan Sultan Ternate seperti bangkit dari tidur panjang. Kebangkitan sultan tersebut serta merta juga membangkitkan instrument-instrumen kesultanan. Instrumen yang dimaksud adalah struktur pemerintahan (adat) kerajaan, yang pada akhirnya juga memunculkan pasukan kuning. Kebangkitan instrument kesultanan tersebut tampaknya dipakai sebagai mesin politik Mudaffar Syah (Sultan Ternate) sebagai kendaraan politiknya dalam pencalonan gubernur Maluku Utara.

<sup>17</sup> Hasim, MT Abdullah, and H. Umar, "Kebangkitan Kesultanan Ternate Pada Era Reformasi 1998-2002." Volume 7, Jurnal Rihlah. 2019. Hal. 71.



*Gambar 4 Drs. H. Mudaffar Syah (Sultan Ternate Ke-48).*

Melihat upaya kebangkitan Sultan Ternate tersebut, Syamsir Andili (Walikota Ternate) dan Bahar Andili (Bupati Halmahera Tengah) sangat mungkin mencari tandingannya dengan menghidupkan kembali instrument Kesultanan Tidore dengan mengangkat Djafar Danoyunus sebagai Sultan Tidore yang baru. Strategi pengimbangan tersebut diduga kuat sangat berkaitan erat dengan mobilisasi dukungan dari kekuatan adat, mengingat Bahar Andili juga memiliki hasrat menjadi gubernur di Maluku Utara. Selain itu adiknya, Syamsir Andili, juga memiliki ambisi untuk tetap mempertahankan kekuasaannya sebagai Walikota Ternate. Tidak mengherankan jika upaya menghidupkan kembali instrument Kesultanan Tidore adalah dalam rangka mencari dukungan di samping sebagai reaksi terhadap ambisi Sultan Ternate.

Selain Bahar Andili dan Syamsir Andili masih bersaudara kandung, diduga mereka juga memiliki kedekatan hubungan bisnis dengan Djafar Danoyunus. Sebagai sesama pengusaha, mereka akhirnya juga bagi-bagi kekuasaan politik. Jatah untuk Bahar adalah menjadi Gubernur Maluku Utara dan Syamsir sebagai Walikota Ternate, sedangkan jatah untuk Djafar Danoyunus ternyata adalah anggota DPD untuk Maluku Utara bersama dengan istri Sultan Ternate.

Dalam sebuah konferensi untuk memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, menjelang sidang MPR yang akan datang, aktivis HMI setempat, Syaiful Bachri Ruray, mengajukan saran mengenai pentingnya pembentukan provinsi baru yang diberi nama Maluku Utara. Sebenarnya, di balik layar, ide tersebut berasal dari pemikiran Bupati Halmahera Tengah, Bahar Andili. Usulan tersebut akhirnya membangkitkan semangat semua orang dan menciptakan gelombang nasionalisme dan persatuan lokal.<sup>18</sup>

Akhirnya, sebelum Presiden Habibie mengakhiri masa jabatannya, ia menandatangani sebuah undang-undang pada tanggal 4 Oktober 1999, yang menetapkan bahwa Maluku Utara akan menjadi provinsi baru (UU 46/1999).<sup>19</sup> Undang-undang tersebut mempertimbangkan berbagai kepentingan kelompok elite di Maluku Utara. Pada saat itu, elite-elite tersebut mulai terlibat dalam perselisihan, dengan satu kelompok terkait dengan Sultan Ternate dan kelompok lainnya menentangnya. Nama provinsi tersebut ditetapkan sebagai Maluku Utara, bukan Maluku Kie Raha seperti yang diinginkan oleh sultan Ternate, dan terdengar lebih modern daripada yang bersifat tradisional.

<sup>18</sup> Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia*. Hal. 186

<sup>19</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat."

Pemekaran Maluku Utara menjadi provinsi baru berdasarkan UU No. 46/1999 memunculkan persaingan politik antara elite kesultanan dan non-kesultanan. Pembentukan Provinsi Maluku Utara diikuti dengan bangkitnya Kesultanan Ternate. Dampak dari kebangkitan kesultanan ini mencakup upaya Sultan Ternate, Mudafar Sjah, dalam menggunakan kembali alat-alat kerajaan untuk mencari legitimasi dalam peran sultan. Persaingan antara elite kesultanan Ternate dan non-kesultanan bukan hanya terkait dengan perebutan kepentingan terhadap sumber daya yang baru, tetapi juga berkaitan dengan memori sosial terkait kejayaan masa lalu. Ketajaman kepentingan politik dan perbedaan kepentingan dalam persaingan memperebutkan sumber daya kekuasaan di tingkat lokal merupakan pemicu timbulnya konflik dalam pemilihan kepala daerah di Maluku Utara. Beberapa isu krusial, seperti nama dan lokasi ibu kota provinsi, persaingan untuk kursi gubernur, dan jabatan birokrasi dalam pemerintahan kabupaten/kota baru, semuanya menjadi isu strategis yang sengaja ditempatkan oleh elite lokal untuk mendapatkan legitimasi atas kepentingan mereka.

Upaya untuk memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat semakin intensif dari kedua belah pihak, terutama dalam rangka menuju pemilihan Gubernur Maluku Utara. Pihak pemerintah, kecuali dewan adat, sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Maluku Utara. Beberapa tokoh yang mendukung pihak ini termasuk Bahar Andili, Abdullah Assagaf, Thaib Armayn, dan elite lokal lainnya, termasuk Sultan Tidore. Sementara itu, sultan Ternate hanya mendapatkan dukungan dari dewan adat Ternate, Jailolo, dan Kao.

Penduduk etnik Makian mendominasi sejumlah jabatan eksekutif tertinggi di wilayah Maluku Utara. Bupati Bahar Andili dari Halmahera Tengah dan adiknya, Syamsir Andili, memimpin kota Ternate, yang kemudian menjadi kabupaten ketiga setelah dipisahkan dari Maluku Utara menjelang akhir Orde Baru. Keberhasilan mereka tidak semata-mata karena hubungan aristokratik dengan kesultanan, melainkan lebih disebabkan oleh kerja keras dan saling dukung-mendukung. Banyak dari mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi di Universitas Khairun dan STAIN Ternate berasal dari kelompok orang Makian.

Gejolak politik di tingkat lokal menciptakan ketidakstabilan di masyarakat. Penguasaan orang-orang Makian dalam pemerintahan semakin memperkuat posisi mereka untuk mendukung pembentukan Maluku Utara sebagai provinsi baru. Sementara itu, upaya sultan Ternate untuk menjadikan Maluku Kie Raha sebagai provinsi tidak berhasil. Penetapan Maluku Utara sebagai provinsi adalah indikasi kegagalan sultan Ternate dalam mencapai posisi gubernur yang diinginkannya.

Tentang perebutan kursi Gubernur Maluku Utara, Tomagola menyatakan, dilatarbelakangi oleh sejarah persaingan hegemoni antara kesultanan Ternate di satu pihak dengan kesultanan Tidore dan Bacan di lain pihak. "Sultan Ternate secara terbuka telah menyatakan minatnya untuk menjadi Gubernur Maluku Utara. Namun, tidak betul jika Sultan Tidore juga ingin jadi Gubernur Maluku Utara. Ia hanya terseret keinginan masyarakat Halmahera Tengah untuk mendukung Bupati Halmahera Tengah menjadi Gubernur Maluku Utara," kata Tomagola.<sup>20</sup>

Bagaimanapun juga, kekuatan masyarakat di Ternate sebenarnya terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah bagian utara Ternate masih didominasi oleh kekuatan pendukung Sultan Ternate, sedangkan Ternate bagian selatan didominasi oleh orang-orang Tidore

<sup>20</sup> "Konflik Maluku Dikendalikan Elite Jakarta." *Kompas*, 6 Januari 2000

dan juga masyarakat Makian yang secara historis memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Kesultanan Ternate.<sup>21</sup>

### 3.2. Konflik Kao-Malifut

Meskipun Pada 1950-an, ekonomi Ternate masih tetap redup akibat tindakan Belanda selama berabad-abad yang melarang perdagangan rempah-rempahnya pada abad ke tujuh belas. Tetapi, pada tahun 1970-an sebuah kota yang berbeda mulai merebak. Ternate, ibukota kabupaten Maluku Utara, dengan sangat pesat berkembang menjadi bagian dari Indonesia. Jalan darat, transportasi laut dan udara meningkatkan lalu lintas antara desa dan kota di kepulauan vulkanik Ternate, dari Ternate ke Halmahera, dan ke Ambon, Manado sampai akhirnya ke Jakarta. Namun itu semua adalah modernisasi tanpa industrialisasi. Memang benar, ada salah satu pabrik kayu lapis terbesar di Indonesia memang dibangun di sebelah selat dangkal sampai Ternate, yaitu Sidangoli, namun kebanyakan pekerjaannya adalah pendatang dari pulau Jawa. Para pendatang dari luar juga menguasai ekspor ikan beku. Pada tahun 1990, struktur pekerjaan di Ternate didominasi oleh pemerintah. Pada tahun terakhir sebelum krisis, yaitu tahun 1997, dibanding sektor nonpertanian dan nonperikanan, proporsi sektor pegawai negeri adalah 13% sedangkan sektor perdagangan 31%. Orientasi masyarakat kelas menengah di Ternate memang bekerja di pemerintahan. Lulusan universitas setempat biasanya bercita-cita sebagai pegawai negeri.<sup>22</sup>

Kota Ternate terus berkembang secara mantap selama pemerintahan Orde Baru. Perkembangan terjadi paling banyak di Ternate bagian selatan, terutama karena kedatangan imigran dari seluruh pelosok Indonesia. Urbanisasi terus terjadi karena dorongan uang dari pemerintah menghasilkan golongan menengah urban menganggap pemerintah begitu penting. Krisis rupiah tidak menyebabkan keruntuhan ekonomi di Maluku Utara, namun pengaruhnya pada kontraktor bangunan sangat serius karena harga-harga bahan bangunan melonjak tajam sejak akhir tahun 1997. Akibatnya pada tahun 1999 bidang industri bangunan merosot tajam dan tetap terpuruk selama beberapa tahun.

Krisis moneter yang semakin parah melanda Indonesia dan Bank Indonesia sebagai institusi negara yang paling berwenang dalam hal ini, sudah menyerah dan tidak mampu mengatasi krisis tersebut, kondisinya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan yang juga tidak mampu mengatasi permasalahan dan justru semakin menambah persoalan dengan mencabut subsidi BBM yang memiliki dampak begitu besar terhadap masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ini melahirkan krisis multidimensional sehingga masyarakat memiliki keresahan dan ingin mengkritisi kebijakan sistem pemerintahan Orde Baru dalam pembangunan nasional.

Pada tanggal 24 Juni 1999, pemerintah di Jakarta merespons permintaan dari Bupati Maluku Utara dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 mengenai pembentukan dan penataan kecamatan baru, yaitu Makian Malifut.<sup>23</sup> Beberapa tim dari pemerintah kabupaten dikirim untuk mensosialisasikan keputusan ini kepada desa-desa Kao yang terkait. Masyarakat Kao yang merasa tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan tersebut merespons dengan sikap yang bermusuhan.

<sup>21</sup> Yanuarti et al., *Konflik Maluku Utara (Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI Press, 2004. Hal. 147

<sup>22</sup> Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia*. Hal. 182

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.

Bila ditelaah lebih lanjut, PP. No. 42/1999 tentang pembentukan dan penataan kecamatan Makian Malifut di wilayah Kao dikarenakan ditemukannya emas di daerah Gosowong, yang merupakan daerah perbatasan antara Kao-Malifut, oleh NHM sebuah perusahaan Australia. Ini membuat para elite lokal semakin tergiur akan sumber daya alam di Maluku Utara dan berusaha menguasainya.

Tentang perebutan tambang emas di Malifut, menurut Tomagola, tambang emas ini terletak di desa-desa penduduk asli Kao, "karena itu, penolakan pihak penduduk asli atas PP No. 42/1999, selain dilatarbelakangi pertimbangan kuantitas antar umat beragama, juga didorong keinginan untuk memonopoli berkah tambang emas." katanya.<sup>24</sup>

Dari perspektif penduduk Kao, pembentukan Kecamatan Makian Malifut berdasarkan PP. No. 42/1999 dianggap sebagai tindakan aneksasi terhadap tanah adat mereka. Wilayah Malifut sebelumnya merupakan bagian dari tanah adat Suku Kao yang dipinjamkan sementara kepada penduduk Makian yang mengungsi akibat kekhawatiran letusan Gunung Kie Besi di Pulau Makian. Di sisi lain, warga Makian yang dipindahkan ke wilayah Malifut merasa bahwa ini adalah instruksi atau keputusan pemerintah, sehingga mereka memiliki hak atas tanah yang mereka tempati. Perselisihan ini semakin diperparah oleh rasa cemburu orang-orang Kao terhadap keberhasilan penduduk Makian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di antaranya sebagai pengusaha, pegawai negeri, dan dalam menduduki berbagai jabatan birokrasi, termasuk menjadi karyawan di tambang emas PT. Nusa Halmahera Minerals.<sup>25</sup>

Pembentukan Kecamatan Malifut merupakan salah satu faktor penting menuju konflik yang terjadi di Kota Ternate, karena pembentukan kecamatan ini merupakan salah satu momentum berkuasanya orang-orang Makian dalam jajaran elite, terutama dalam penguasaan birokrasi di Maluku Utara. Apalagi pada saat itu kondisinya baru saja terjadi reformasi, dan Otonomi Daerah dalam kebijakan desentralisasi masih dalam bentuk wacana. Oleh karena itu, kebijakan mengenai pemekaran atau pembentukan wilayah baru tidaklah melewati proses yang rumit. Kebijakan pemberian status kecamatan kepada wilayah Malifut memang sangat diharapkan oleh orang-orang Makian terutama yang telah lama menetap di wilayah Kecamatan Kao.

Berbeda dengan penduduk Malifut, ternyata masyarakat Kao tidak menghendaki pembentukan wilayah baru. Rasa kehilangan mereka semakin membesar ketika sebagian wilayah asli mereka harus menjadi bagian dari kecamatan baru. Namun demikian, lima desa (Sosol, Wangeotak, Gayok, Balisosang, dan Tabobo) yang secara budaya terkait dengan wilayah Kao harus bergabung dengan wilayah Malifut agar memenuhi persyaratan luas wilayah dan jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk membentuk satu kecamatan baru. Meskipun demikian, kelima desa tersebut tidak bersedia dan sangat menentang untuk digabungkan ke dalam wilayah Kecamatan Makian Malifut. Menurut adat, kelima desa tersebut telah terikat oleh sumpah leluhur yang menyatakan bahwa mereka adalah satu dengan saudara-saudara mereka di seluruh Kecamatan Kao yang berada dalam satu ikatan suku/soa.

Dengan pembentukan Kecamatan Malifut, kesenjangan yang ada menjadi diperkuat dengan kebencian akibat semakin menguatnya identitas Suku Makian yang notabene merupakan suku pendatang. Persoalan nama Kecamatan Makian Malifut ternyata juga sangat mengusik perasaan warga Kao yang telah lama tinggal dan menjadi tuan rumah untuk wilayah yang kini ditempati oleh orang-orang Makian.

<sup>24</sup> "Konflik Maluku Dikendalikan Elite Jakarta." *Kompas*, 6 Januari 2000

<sup>25</sup> Yanuarti, Yusuf, et al., *Konflik Maluku Utara (Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI Press, 2004. Hal. 74

Orang Makian dengan cara yang terorganisir tampak mempersiapkan wilayah Malifut sebagai tempat tinggal kedua mereka, yang mereka sebut sebagai daerah Makian Daratan. Situasinya menjadi semakin rumit ketika pembentukan Kecamatan Malifut ternyata mencakup 5 desa dari Kecamatan Kao dan 6 desa dari Kecamatan Jailolo. Ini merupakan pencaplokan ganda yang tentu sulit diterima oleh masyarakat Kao. Di sisi lain, bagi orang Makian, keberlakuan PP. No. 42/1999 dianggap sebagai suatu peraturan yang harus diikuti. Mereka menekankan pada pemerintah untuk segera melaksanakan PP. No. 42/1999 melalui berbagai tindakan, baik di Malifut maupun di Ternate, yang pada saat itu menjadi ibu kota Kabupaten Maluku Utara.

Terlepas dari persoalan agama, titik penting yang sangat dipermasalahkan oleh masyarakat Kao adalah persoalan wilayah adat dan penghargaan terhadap nilai-nilai asli (Kao). Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara memutuskan secara sepihak pembentukan Kecamatan Makian Malifut berdasarkan PP, No. 42/1999, tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat tempatan, terutama yang akan menjadi wilayahnya. Padahal, sebenarnya masih banyak agenda pemekaran wilayah yang harus ditangani di tingkat kabupaten – akibat pembentukan Provinsi Maluku Utara – daripada harus buru-buru memekarkan wilayah kecamatan.

Ternyata, persoalan pemekaran tidak selesai hanya sampai dengan pembentukan Kecamatan Malifut. Terdapat potensi konflik antar daerah terutama yang menyangkut perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat, dan bahkan menyangkut juga perbatasan dengan Kecamatan Malifut yang telah diundangkan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan yang ada, jelas Kecamatan Malifut yang dibentuk berdasarkan PP. No. 42/1999 merupakan bagian dari Halmahera Utara. Meskipun begitu, di dalam ketentuan wilayah yang diberikan kepada Kabupaten Halmahera Barat meliputi beberapa desa yang sebenarnya secara sah masih berada dalam wilayah Kecamatan Malifut. Beberapa desa yang masih menjadi perebutan wilayah perbatasan tersebut adalah Desa Akelamo Kao dan Desa Bobaneigo. Desa Akelamo merupakan perbatasan antara Kecamatan Jailolo (Ibukota Kabupaten Halmahera Barat) dengan Kecamatan Malifut, sedangkan Desa Bobaneigo merupakan perbatasan antara Kecamatan Jailolo Selatan dengan Kecamatan Kao.

Perebutan perbatasan tersebut ternyata berkaitan dengan sumber daya alam yang terdapat di sekitar wilayah sengketa tersebut. Ketidakrelaan masyarakat Kao melepas Malifut menjadi kecamatan sendiri sangat beralasan karena berkaitan erat dengan tambang emas di wilayah tersebut. Begitu juga dengan wilayah yang diperebutkan antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara di sekitar Desa Akelamo dan Bobaneigo. Untuk diketahui, bahwa saat ini banyak terdapat aktivitas pertambangan di sekitar kawasan tersebut.

Selain itu, isu kesenjangan ekonomi antara pusat-daerah dengan sentralisme di Jakarta yang merupakan suatu ketidakadilan juga bisa sampai menyeret isu suku, ras, agama dan antar golongan kedalam lingkungan konflik, maka persoalan akan jauh lebih rumit dan bahkan dapat menimbulkan pertumpahan darah seiring berjalannya waktu.

Ketegangan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 1999, dan pada tanggal 18 Agustus, kerusuhan pecah yang berujung pada pembakaran sebuah rumah. Bahkan, pada hari berikutnya, terjadi pertikaian antara penduduk Desa Sosol (Kao) dan Desa Tahane (Makian), yang kemudian meluas hingga mencakup Desa Wangeotak. Dampak kerusuhan ini menyebabkan warga dari lima desa Suku Kao yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Malifut mengungsi ke Kao, yang merupakan ibu kota Kecamatan Kao. Kabar dari para pengungsi lima desa ini menyulut kemarahan warga Suku Kao,

yang pada akhirnya menyerang desa-desa orang Makian di Malifut pada tanggal 21 dan 25 Agustus 1999. Konflik ini mengakibatkan sekitar 2000 warga Makian di Malifut mengungsi ke berbagai wilayah, terutama di Ternate dan Tidore.

Dalam insiden kerusuhan ini, setidaknya 26 orang kehilangan nyawa dan ratusan lainnya mengalami luka. Sebanyak 16 desa mengalami kerusakan signifikan, dengan lebih dari 800 rumah hancur, termasuk fasilitas umum seperti terminal, kantor kecamatan, dan pasar. Jumlah bangunan sekolah yang rusak mencapai 81 unit. Sementara itu, fasilitas ibadah juga tidak luput dari kerusakan, dengan 17 masjid dan sebuah gereja mengalami kerusakan.

### 3.3. Dampak Konflik Ambon

Mudah Sebagai daerah transit provinsi Maluku Utara, Kota Ternate mengalami mobilitas penduduk yang sangat tinggi di daerah ini. Semua kendaraan baik dari darat, laut, maupun udara terpusat di Kota Ternate. Oleh karena itu, di Kota Ternate banyak juga didiami oleh orang-orang lokal Maluku Utara seperti orang Ternate, Tidore, Makian, Bacan, Jailolo, Tobelo, Galela, dan lain lain serta yang bukan lokal seperti Jawa, Makassar, Arab, hingga Tionghoa. Hal ini membuat Kota Ternate memiliki penduduk yang sangat majemuk.

Kemajemukan etnis ini secara khususnya lebih banyak terjadi di daerah perkotaan saja, dimana semua etnis hidup saling berdampingan. Meskipun demikian, lambat laun pengaruh kemajemukan secara perlahan-lahan juga merembes memasuki daerah pedesaan. Sehingga, dengan masuknya penduduk yang berasal dari luar daerah tersebut turut merubah suasana masyarakat secara keseluruhan.

Kota Ternate merupakan kota yang aman, yang hidup dengan adat istiadat dan kerukunan selama bertahun-tahun. Kondisi sosial Kota Ternate mulai berubah ketika datang pengungsi Muslim dari Ambon maupun dari Halmahera yang merupakan orang-orang Malifut dikarenakan terjadi konflik.<sup>26</sup> Hal ini membuat orang Islam dan Kristen di Kota Ternate mulai saling curiga satu sama lain.

Dalam sejarahnya, Maluku seringkali diwarnai oleh konflik yang memiliki elemen SARA. Meningkatnya migrasi orang Buton, Bugis Makassar (BBM) ke Ambon dan wilayah Maluku lainnya menyebabkan persaingan dagang dengan penduduk asli. Persaingan ekonomi antara pendatang dan orang Ambon berakibat pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pada tanggal 19 Januari 1999, bersamaan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1419 Hijriah, yang dikenal sebagai hari kemenangan bagi umat Islam, sebuah tragedi berdarah terjadi.<sup>27</sup> Meskipun bagi umat Islam hari kemenangan adalah momen untuk merayakan kebersihan setelah menjalankan puasa selama sebulan, kenyataannya situasinya berubah menjadi tragedi berdarah.

Kerusuhan di Ambon memiliki dampak yang cukup penting dalam mempercepat atau menjadi akselerator konflik di Kota Ternate. Meskipun ini tidak serta merta, karena kerusuhan di Ambon yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1999, baru menyebar ke daerah Maluku Utara pada bulan Agustus 1999. Akselerasi yang ditimbulkan dari kerusuhan Ambon –seperti yang sudah disinggung sebelumnya- berbentuk kedatangan para pengungsi dari Ambon ke Kota Ternate, ditambah dengan berita yang mereka bawa. Pelan tapi pasti dampak dari para pengungsi Ambon mulai terasa. Mereka memanaskan

<sup>26</sup> "Pengungsi Halmahera di Ternate." *Kompas*, 11 Januari 2000

<sup>27</sup> Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010. Hal. 153.

kondisi sosial masyarakat dengan dendam dan trauma, dan tampaknya adanya kelompok provokator yang memang sengaja mengkopi kerusuhan di Ambon agar dapat meledak juga di Maluku Utara. Hal tersebut dapat dilihat dengan beredarnya selebaran gelap berupa surat dari Ketua Sinode GPM (Gereja Protestan Maluku) Semi Titaley kepada Ketua Sinode GMIH (Gereja Masehi Injili Halmahera) tentang rencana serangan balik "Sosol Berdarah"<sup>28</sup> yang terjadi antara warga Malifut dan Kao.

Memang dapat dikatakan bahwa ideologi yang dibawa oleh SI pada awalnya terpengaruh dengan hadirnya sosialisme-marxisme atau komunisme yang dibawa oleh para tokoh sosialis Belanda. Istilah dan konsep kunci seperti kapitalis (kaum uang atau pemilik modal), proletar (kaum buruh), hingga aksi pemogokan tidak dapat dipungkiri terpengaruh dari ajaran sosialisme-marxisme yang menguat di kalangan tokoh pergerakan khususnya di dalam SI. Sebagai respon atas hal tersebut, akhirnya para pemimpin SI yang meskipun tidak bergabung dengan ISDV/PKI, akhirnya turut mengambil sikap yang radikal dalam memandang pertentangan kelas. Meski demikian, masih adanya pengaruh yang kuat dari pemikiran Islam khususnya kalangan modernis, membuat para pemimpin SI seperti Tjokroaminoto, Agus Salim, Soerjopranoto, Fachruddin, hingga Abdoel Moeis tidak sepenuhnya menelan mentah-mentah sosialisme-marxisme sehingga mereka membangun sebuah pemikiran dan aksi tersendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan dari sosialisme yang dianut SI yang mana puncaknya termuat dalam karya Tjokroaminoto pada 1924 yang secara tegas menyebutnya sebagai sosialisme Islam.

#### *Pecahnya Konflik Sosial di Kota Ternate*

### **1. Pecahnya Konflik Islam dan Kristen**

Konflik yang terjadi di Kota Ternate masih saling berhubungan dengan konflik yang sebelumnya sudah terjadi di Ambon, Malifut – Kao, Tidore, dan lain-lain. Konflik di Ternate merupakan puncak reaksi dari warga Islam Makian terhadap peristiwa Sosol di wilayah Kao. Selain itu, terdapat satu pemicu juga yang membuat konflik di Ternate ini terjadi yaitu beredarnya surat palsu dari Ketua Sinode GPM (Gereja Protestan Maluku), Pendeta S.P Titaley yang ditujukan kepada Ketua Sinode GMIH (Gereja Masehi Injili Halmahera) yang di dalamnya berisi ajakan untuk memusnahkan warga Muslim di Maluku Utara, secara khusus warga Muslim di wilayah Malifut.<sup>29</sup>

Konflik di Ternate banyak menelan korban jiwa maupun korban harta benda, terutama bagi warga Kristen. Sehingga banyak warga Kristen yang harus mengungsi ke Manado, Halmahera dan beberapa daerah lain yang aman.

Pada awal bulan Oktober 1999, situasi keamanan di Kota Ternate sudah mulai mencekam. Hal itu dikarenakan beredar isu untuk mengharuskan warga Kristen asal Ambon segera meninggalkan Kota Ternate sebab akan dilaksanakan *Natal Berdarah* di bulan Desember nanti. Sejak saat itu, di beberapa kelurahan di Kota Ternate hampir setiap pukul 02.00 WIT dini hari beberapa warga Islam melakukan kegiatan-kegiatan khusus di Masjid, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi sebagian warga Kristen. Meskipun demikian, pertemuan warga Muslim di masjid itu bertujuan untuk membangun sistem keamanan di

<sup>28</sup> Sosol Berdarah adalah penyebutan untuk konflik melibatkan antara warga Malifut yang mayoritas Islam dan Kao yang mayoritas Kristen. Peristiwa ini pertama kali terjadi di Desa Sosol, Kecamatan Kao, sehingga dikatakan sebagai peristiwa Sosol Berdarah.

<sup>29</sup> Nanere et al., *Halmahera Berdarah*. Ambon: Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam, 2000. Hal. 81

Ternate yang baru saja diresmikan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, agar para provokator tidak leluasa melakukan aksinya.<sup>30</sup>

Pada tanggal 24 Oktober 1999 malam, para pengungsi dari Malifut yang merupakan warga Makian tiba di Kota Ternate. Saat itu warga Kota Ternate dihimbau oleh Pemerintah Daerah untuk memberi bantuan berupa makanan, pakaian layak pakai dan selimut kepada pengungsi. Kemudian pada esok harinya, tanggal 25 Oktober 1999, di Kampus Universitas Khairun (UNKHAIR), ada sekelompok warga Makian, secara membabi buta melakukan pemukulan kepada beberapa mahasiswa ksiten asal Halmahera.<sup>31</sup>

Setelah peristiwa itu, suasananya menjadi semakin tegang. Warga Kristen tidak lagi merasa tenang dalam melakukan kegiatan ibadahnya. Mulai dari pelemparan batu ke gedung-gedung Gereja pada saat warga Kristen sementara beribadah. Selain itu, pelemparan batu juga diarahkan ke rumah-rumah warga Kristen, bahkan beberapa sempat terjadi pengrusakan. Melihat situasi keamanan yang semakin tidak menentu, pada tanggal 28 Oktober 1999, beberapa orang tua asal Halmahera Utara yang tinggal di Ternate, mengambil inisiatif bertemu Kapolres Maluku Utara di Ternate.<sup>32</sup> Dalam pertemuan itu, mereka meminta penjelasan dari pihak kepolisian tentang:

- . Latar belakang konflik di Malifut,
- . Meminta perlindungan keamanan atas mahasiswa-mahasiswa Kristen asal Halmahera di UNKHAIR dari serangan warga Makian,
- . Meminta penjelasan tentang isu *Peta penyerangan GPM di Ternate*.

Akhirnya Kapolres memberi penjelasan tentang latar belakang konflik yang terjadi di Kecamatan Kao Malifut. Kapolres menjamin keamanan para mahasiswa Kristen asal Halmahera yang berkuliah di UNKHAIR. Tentang isu peta, menurut Kapolres Peta yang beredar aslinya berjudul Peta pelayanan Gereja Protestan Maluku (GPM) di Ternate yang dibuat oleh salah seorang Vikaris di Lingkungan GPM-Ternate. Kemudian judul Peta tersebut dirubah oleh provokator menjadi *Peta Penyerangan GPM di Ternate*. Isu tersebut telah diselesaikan oleh Forum Komunikasi anta umat beragam di Ternate. Dalam pertemuan itu, warga Halmahera Utara mengaskan bahwa masyarakat Halmahera Utara tidak ikut campur dalam permasalahan antar warga Kao dan Makian di Malifut.

Pada tanggal 1 s/d 3 November 1999, beredar selebaran gelap berupa surat dari Ketua Sinode GPM Semi Titaley kepada Ketua Sinode GMIH di Tobelo tentang rencana serangan balik "Sosol Berdarah". Selebaran ini menimbulkan emosi warga Islam sehingga warga Kristen di Kota Ternate semakin tegang. Sejak itu, situasi keamanan di Kota Ternate semakin mencekam.

Pada hari Jum'at tanggal 5 November 1999 pagi, sekitar pukul 04;30 WIT, terjadi pelemparan, penjarahan, pembakaran rumah-rumah warga Kristen dan juga pembakaran gedung Gereja serta pembunuhan warga Kristen. Warga Kristen yang lolos dari pembantaian mencari perlindungan di Asrama Polres, Asrama Kodim, Asrama TNI AD di kelurahan Skep dan Asrama TNI AL. Beberapa hari kemudian, warga Kristen Ternate dievakuasi dengan kapal perang TNI AL ke Bitung, Tobelo, dan Morotai. Sedangkan yang lain sebelumnya sudah melarikan diri ke Tobelo, Jailolo, Sahu, Papua, Bitung, Manado, dan ke daerah-daerah yang menurut mereka aman, menggunakan perahu motor kecil dan kapal.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal 82.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal 82.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal 83.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hal. 83.

Menurut keterangan dari Kepala Pajak Bumi dan Bangunan Ternate (Bapak Albertus), walaupun warga Kristen sudah mengungsi ke asrama Polres, Kodim, dan asrama TNI AD di Skep warga Islam masih terus berusaha mengejar dan membantai. Pihak aparat terkesan tidak serius dalam melindungi warga Kristen yang sementara terancam. Namun pada saat itu, terdapat sekelompok warga sipil yang memakai ikan kepala kuning, yang disebut *Pasukan Kuning*, justru berupaya menahan warga Islam yang secara membabi buta mengejar warga Kristen. Pasukan kuning ini, adalah dewan adat yang dibentuk oleh Sultan Ternate kala itu yakni, Drs. H. Mudjaffar Syah. Mereka tidak memihak pada salah satu kelompok warga, namun mereka bertugas untuk menjaga keamanan rakyat Sultan Ternate, yang memang terdiri dari warga Islam, Kristen, dan warga yang masih animis. Ketika kapal perang tiba di pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk mengevakuasi warga Kristen, warga Islam terus mengejar mereka sampai ke pelabuhan. Untungnya ada pasukan kuning yang terus menghambat serangan warga Islam sehingga, tidak banyak warga Kristen yang menjadi korban. Walaupun demikian, ada beberapa warga Kristen yang telah menjadi korban.<sup>34</sup>

Peristiwa pembantaian terhadap warga Kristen di Ternate berlangsung selama seminggu, terhitung dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 November 1999. Setelah itu, semua warga Kristen sudah tidak ada lagi di pulau Ternate. Rumah-rumah mereka yang ditinggalkan dijarah lalu dibakar. Demikian juga dengan toko-toko milik warga Kristen. Rumah warga Kristen yang tidak rusak di tempati oleh warga Islam.

## 2. Konflik Putih dan Kuning

Pada akhir tahun 1998, untuk mendukung agenda sultan dalam upaya pemekaran provinsi baru, Sultan Ternate memanfaatkan kekuatan fisik sebagai kartu rahasia. Generasi Muda Sultan Babullah (Gemusba) mengidentifikasi diri mereka sebagai “pengamanan tradisional kedaton” dan menonjolkan warisan budaya di sekitar sultan sebagai bagian dari identitas mereka yang mapan.<sup>35</sup> Gemusba berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan masyarakat untuk sultan. Pemimpin Gemusba menggambarkan budaya desa di mana anggota Gemusba berasal sebagai komunitas yang setia dan fanatik terhadap sultan. Desa-desa ini terletak di wilayah geografis yang dianggap sebagai kerajaan sultan, termasuk Pulau Hiri di ujung barat daya Ternate, serta Kao dan Tobelo di Halmahera (dengan mayoritas penduduk Kristen). Meskipun demikian, Gemusba sebenarnya bukanlah organisasi adat yang tumbuh dari tingkat bawah. Gemusba memiliki keterkaitan erat dengan Golkar dan militer.

Di sisi yang berseberangan, pasukan putih merupakan kelompok pasukan yang terbentuk dari orang-orang Muslim Makian, Tidore, dan Halmahera.<sup>36</sup> Terbentuknya pasukan ini dikarenakan dampak dari konflik Maluku yang menyebar ke Malifut dan Kao yang sebelumnya konflik antar etnis kemudian berubah menjadi konflik agama.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hal. 84.

<sup>35</sup> Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia*. Jakarta: KTLV – Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hal. 195.

<sup>36</sup> Yanuarti, Yusuf, et al., *Konflik Maluku Utara (Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI Press, 2004. Hal. 141.



*Gambar 5 Pelepasan Pasukan Putih di Tidore.*

Setelah kerusuhan antar umat Islam dan Kristen di Ternate mereda, situasi menjadi tenang ketika warga Kristen secara massal mengungsi ke Manado, Bitung, dan Tobelo. Namun, setelah kurang dari 50 hari, tepatnya pada tanggal 26 Desember 1999, terjadi kembali aksi kerusuhan di Ternate. Kali ini, pasukan yang dikenal sebagai pasukan putih menyerang bagian utara kota Ternate yang dijaga ketat oleh Dewan Adat (pasukan kuning). Bangunan-bangunan sekolah yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Katolik dan Yayasan Pendidikan Protestan dibakar, bahkan Gereja Katolik dan Protestan tidak luput dari kebrutalan pasukan putih. Meskipun dicegah oleh pasukan kuning, panah dan batu dilemparkan ke arah pasukan kuning.

Pada tanggal 27 Desember 1999, warga Islam menyerang pasukan kuning yang sementara menjaga kantor Golkar Maluku Utara. Akhirnya mereka membakar kantor tersebut. Akibat penyerangan tersebut, pasukan kuning melakukan serangan balasan dan membakar sejumlah rumah warga Islam di kelurahan Kampung Pisang.<sup>37</sup>

Untuk mengatasi konflik antara pasukan kuning dan pasukan putih (sama-sama Islam), pasukan Polisi dan TNI turun tangan untuk meredakan pertikaian tersebut. Kedua pasukan diperintahkan mundur oleh aparat tetapi respon yang terjadi malah sebaliknya, kedua pasukan masih saling menyerang. Para aparat tidak bisa membendung serangan yang dilancarkan oleh kedua pasukan yang berkonflik.

Karena perbandingan pasukan yang tidak sebanding antara pasukan putih dan pasukan kuning, dimana pasukan putih lebih dominan dari segi jumlah akhirnya pasukan putih berhasil mendesak pasukan kuning ke pertahanan terakhir mereka yaitu di Kedaton Kesultanan Ternate. Akibatnya, pasukan putih semakin meluas sehingga seluruh bangunan sekolah dan tempat ibadah warga Kristen habis terbakar.

Penyerangan pasukan putih yang lebih mendominasi tersebut bukan tanpa sebab. Mereka dipicu oleh kejadian yang terjadi oleh masyarakat muslim Makian Malifut yang diserang habis-habisan oleh masyarakat Kao dalam konflik Kao-Malifut. Selain itu, mereka juga merasa bahwa sultan Ternate lebih condong memberi dukungan kepada orang Kristen dengan membuat pasukan kuning untuk menghadang pasukan putih.

<sup>37</sup> Nanere et al., *Halmahera Berdarah*. Ambon: Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam, 2000. Hal. 84.

Padahal maksud dari sultan ternate adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya baik yang Islam maupun yang Kristen untuk tidak saling berkonflik.<sup>38</sup>

Rasa sedih menyelimuti kota Ternate, karena kota Ternate yang sebelumnya terkenal sebagai kota yang aman, damai, dan penuh toleransi antar umat beragama selama berabad-abad, kini lenyap begitu saja. Hal ini terjadi seiring dengan konflik antara elite-elite yang menggunakan etnis dan agama sebagai kedok untuk mengejar ambisi politik dan kepentingan sesaat mereka.

Dalam konflik ini tampak jelas pendukung kedua kesultanan ini, di mana Sultan Ternate yang didukung oleh Dewan Adat atau lebih dikenal dengan pasukan kuning karena memakai ikat kepala kain kuning, yang menguasai bagian utara Kota Ternate, sedangkan Sultan Tidore dengan pasukan putih yang juga dipimpin oleh Kepala Desa Tahani menguasai bagian selatan Kota Ternate, saling menyerang satu sama lain. Aksi kekerasan antara kedua pihak kemudian dapat diredam atas kesadaran masing-masing pihak, di mana konflik dapat merugikan serta merusak semua tatanan kehidupan yang telah dibangun sekian lama dengan susah payah dan hanya menguntungkan segelintir orang (kelompok elite) yang haus akan harta dan takhta.

Dalam konteks ini, terlihat dengan jelas bahwa konflik Putih Kuning ini lebih merupakan pertarungan untuk merebut kekuasaan daripada konflik antar-agama. Pada kenyataannya, yang berhadapan adalah pasukan kuning yang membela Kesultanan Ternate di satu sisi, dan pasukan putih yang mewakili Kesultanan Tidore, didukung oleh orang Makian. Mereka ingin menguasai kekuasaan melalui upaya pembersihan berbasis agama di Maluku Utara. Akumulasi dari berbagai kepentingan itu, terjadilah penyerangan pasukan putih terhadap Keraton Kesultanan Ternate, dihadap oleh pasukan kuning di mana kedua pihak sama-sama beragama Islam. Selanjutnya dilakukan suatu kompromi kedua pihak, pasukan putih diwakili Sultan Tidore dan pasukan kuning diwakili Sultan Ternate, menghasilkan suatu kesepakatan dengan menandatangani surat perdamaian.

Pada esok harinya, tanggal 28 Desember 1999, sekitar pukul 09:00 WIT, Sultan Ternate dihubungi oleh Gubernur Maluku Utara, Surasmin, sekaligus meminta sultan untuk mengadakan pertemuan dengan para pemuka masyarakat guna menghentikan pertikaian. Ajakan itu disambut baik oleh Sultan Ternate. Pertemuan itu dilaksanakan di Kedaton Kesultanan Ternate.<sup>39</sup>

Kemudian pada tanggal 28 Desember 1999 atas perintah gubernur Maluku Utara, Surasmin, diadakanlah pertemuan untuk membicarakan tentang perdamaian atas konflik di yang terjadi di Kota Ternate secara khusus dan di Maluku Utara secara umum. Sultan Ternate mempersilahkan seluruh warga untuk datang ke Kedaton, saat itu, hadir juga Gubernur Maluku Utara, Surasmin, dan Sultan Tidore, H. Djaffar Syah. Akhir dari pertemuan itu dicapai kesepakatan untuk menciptakan suasana damai.<sup>40</sup> Isi dari kesepakatan tersebut adalah:

1. Penarikan pasukan kuning dan pasukan putih ke pos masing-masing
2. Perbaikan dan pembenahan kerusakan akibat konflik akan diusahakan oleh Sultan Ternate dan Sultan Tidore, Pemda, dan Pemerintah Pusat.
3. Segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Tobelo dan Maluku Utara
4. Masalah keamanan sepenuhnya diserahkan kepada aparat keamanan
5. Masalah Malifut akan diselesaikan dalam waktu singkat.

<sup>38</sup> Sahbir (Masyarakat Kota Ternate), Wawancara pada tanggal 23 September 2023 via Telepon.

<sup>39</sup> Nanere et al., *Halmahera Berdarah.*, Halmahera Berdarah. Ambon: Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam, 2000. Hal. 84.

<sup>40</sup> Nanere et al., *Halmahera Berdarah.* Ambon: Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam, 2000. Hal. 85

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Sultan Ternate, Drs. H. Mudaffar Syah, Sultan Bacan, Gahrul Syah, Sultan Tidore, H. Djaffar Syah, dan Gubernur Maluku Utara, Surasmin.



*Gambar 6 Para Sultan di bumi Moloku Kie Raha.*

Dalam suasana konflik, fakta menunjukkan bahwa setiap orang dan kelompok memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap identitas khususnya agama. Meskipun sejak awal, sebagian warga sudah meyakini bahwa konflik yang terjadi bukan konflik agama. Memang tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat untuk mempercayai hal tersebut. Kondisi ini bisa dipahami mengingat pola pemukiman penduduk yang cenderung segregatif sehingga interaksi secara fisik cenderung terbatas dalam lingkungan masyarakat yang segama.

Dalam konteks inilah netralitas pemerintah dan aparat keamanan menjadi sangat menentukan. Di sisi lain, pendekatan kesejahteraan yang disertai prinsip keadilan menjadi begitu penting. Dalam bahasa yang berbeda, pemerintah dituntut untuk konsisten dalam berlaku adil terhadap perbedaan. Dengan cara demikian, apa yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan andil bagi upaya resolusi konflik dan membangun perdamaian.

#### **4. Penutup**

Ketika Konflik berdarah secara umum di Maluku Utara dan khususnya di Ternate tahun 1999-2000 sepenuhnya berkaitan dengan urusan elite politik lokal. Elite politik yang dibagi menjadi kubu Selatan dan kubu Utara sebenarnya hanyalah sekelompok tokoh atau pejabat lokal yang memiliki kaitan dengan dalang di Jakarta, kebanyakan dari mereka adalah mantan pejabat Orde Baru. Mereka masih ingin mempertahankan kekuasaan di Provinsi Maluku Utara yang baru dibentuk. Sesuai dengan praktik Orde Baru yang mengutamakan kekayaan dan jabatan, serta siap menggunakan segala cara, elite lokal ini bahkan rela mengorbankan nyawa rakyat kecil demi kekuasaan mereka yang tak terbatas.

Sengketa di Kao - Malifut harus segera diselesaikan dengan adil agar tidak menjadi sumber konflik yang terus berlanjut. Upaya mereka untuk menimbulkan konflik antara penduduk Kesultanan Ternate dan Tidore hanyalah skenario keji dan manuver untuk merebut jabatan Gubernur. Penunjukan H. Djafar Dano Junus sebagai "Sultan Tidore" yang didukung oleh Kubu Selatan sebelum pembentukan Provinsi Maluku Utara nampaknya hanya sebagai boneka yang akan dijadikan alat untuk dikendalikan dan diadu dengan Mudjaffar Sjah/Sultan Ternate dari Kubu Utara. Penunjukan "Sultan

Tidore" sendiri menghadapi kontroversi karena dilakukan melalui proses yang dipertanyakan, menyebabkan ketidakstabilan. Skema adu domba dengan memanipulasi sentimen kesultanan ternyata berhasil, dan rakyat kecil yang tidak bersalah dari kedua kubu, di tengah bangkrutnya negara karena krisis moneter, harus menjadi korban sia-sia.<sup>41</sup>

Konflik yang terjadi di Kota Ternate memiliki bekas tersendiri bagi masyarakat. Dimana awalnya masyarakat Kota Ternate yang hidup aman dan damai dengan beralaskan nilai-nilai dan norma-norma adat, hangus ditelan kabut hitam bangunan yang terbakar.

Berdasarkan penjelasan di bab-bab sebelumnya, bahwa motif lokal dalam konflik sosial yang terjadi di Kota Ternate ini dipicu oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999 tentang pemekaran kecamatan Makian Malifut yang ditolak oleh masyarakat Kao sebagai penduduk asli daerah tersebut sehingga terjadi konflik antar warga, yaitu warga Sosol (Kao) dengan warga Tahane (Makian). Dimana dalam konflik ini masih bermotif konflik antar etnis.
2. Konflik kemudian berubah menjadi konflik agama dikarenakan banyak pengungsi muslim dari Ambon yang membuat masyarakat muslim di Ternate merasa iba dengan para pengungsi tersebut sehingga timbul rasa memiliki kondisi yang sama dan menyebabkan terjadinya penyarengan terhadap orang-orang Kristen di Ternate.
3. Setelah konflik berubah dari yang semula antar warga menjadi antar agama, terdapat surat yang berasal dari Ketua Sinode GPM kepada Ketua Sinode GMIH yang beredar. Dalam surat tersebut berisikan strategi serangan balik Sosol berdarah yang bertujuan untuk memusnahkan seluruh umat muslim yang ada di Maluku Utara. Kemudian setelah diselidiki ditemukan bahwa surat edaran tersebut merupakan surat palsu yang merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dari para provokator.
4. Konflik status Provinsi, dimana Maluku Utara baru dimekarkan – sebelumnya masih tergabung dengan Provinsi Maluku – menjadi sebuah provinsi tersendiri dan para elite politik lokal bersaing untuk memperebutkan kedudukan tertinggi provinsi yaitu jabatan Gubernur.

#### Daftar Pustaka

- Alhadar, Smith. "Peristiwa Menjelang Kerusuhan Maluku Utara." *Kompas*, January 15, 2000.
- Hasim, Rustam, Oktasiyanti MT Abdullah, and Siti Rahia H. Umar. "Kebangkitan Kesultanan Ternate Pada Era Reformasi 1998-2002." *Rihlah* Volume 7 (2019).
- Klinken, Gerry van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Kompas*. "Jalur Makassar-Ternate Dibuka Asal Ada Jaminan Keamanan." January 12, 2000.
- Kompas*. "Kasus Maluku Utara Mainan Elite Politik Lokal." January 10, 2000.
- Kompas*. "Konflik Maluku Dikendalikan Elite Jakarta." January 6, 2000.
- Kompas*. "Pengungsi Halmahera di Ternate." January 11, 2000.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cetakan I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
- M. Junaidi. "Sejarah Konflik Dan Perdamaian Di Maluku Utara (Refleksi Terhadap Sejarah Moloku Kie Raha)," n.d., 26.
- Nanere, Jan, Randy Mangimbulude, John Lahade, Flip Litaay, Yapi Watloly, and Agus Kastanya. *Halmahera Berdarah*. Seri Pertama. Ambon: Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam (BIMASPELA), 2000.

<sup>41</sup> "Kasus Maluku Utara Mainan Elite Politik Lokal." *Kompas*, 10 Januari 2000.

- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku,” May 26, 1999.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. Eighth Edition. New York, Americas: McGraw-Hill, 2011.
- Sahbir. Wawancara, September 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Edisi baru 3. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Totona, Abdullah. *Ambiguitas Kaum Intelektual: Representasi Identitas pada Konflik Maluku Utara 1999-2000*. Cetakan I. Yogyakarta: Galang Press, 2017.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” October 4, 1999.
- Waileruny, Samuel. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Yanuarti, Sri, Yusuf, Josephine Rosa Marieta, and Mardiyanto Wahyu Tryatmoko. *Konflik Maluku Utara (Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang)*. Jakarta: Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, 2004.